

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 24 Februari 2022, Putin mengerahkan pasukannya untuk melakukan operasi militer khusus di Ukraina dengan klaim melakukan demiliterisasi dan denazifikasi untuk menyelamatkan orang-orang Rusia yang mengalami genosida serta penyiksaan di Donbas. Berdasarkan data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), kebijakan tersebut menyebabkan sebanyak sepuluh juta orang, atau sekitar seperempat dari populasi Ukraina terpaksa meninggalkan tempat tinggal untuk mengungsi. Dari jumlah tersebut, hampir empat juta telah mencari suaka ke negara-negara tetangga, termasuk Hungaria, Moldova, Rumania, dan Polandia. Pada bulan Maret 2022, PBB mencatat setidaknya 902 warga sipil tewas dan 1.459 mengalami luka-luka. Merespon hal ini, banyak negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Jepang, dan Selandia Baru melimpahkan berbagai sanksi, mulai dari larangan ekspor impor, mengeluarkan Rusia dari sistem perbankan SWIFT, hingga larangan bepergian dan pembekuan aset sejumlah elit pemerintahan.

Hingga saat ini, perang antara Rusia-Ukraina masih berlanjut dengan intensitas yang semakin tinggi. Pada bulan November tahun 2023, Rusia meluncurkan serangan *drone* besar-besaran di Kyiv dan Kherson yang kemudian dibalas Ukraina dengan serangan *drone* yang memaksa tiga bandara internasional

Rusia ditutup. Pada tanggal 17 Februari 2024, Rusia berhasil menaklukkan Avdiivka dan memaksa tentara Ukraina mundur dari wilayah tersebut. Data terbaru dari UN Human Rights Monitoring Mission (HRMMU) di Ukraina per Februari 2024 menyatakan bahwa perang Rusia-Ukraina telah membunuh lebih dari sepuluh ribu masyarakat sipil dan melukai hampir dua puluh ribu orang.

Tulisan ini dibuat dengan tujuan memberikan perspektif baru bagi pembaca mengenai kebijakan operasi militer khusus Rusia di Ukraina dengan melibatkan faktor-faktor psikologis Putin dalam pembuatan kebijakan tersebut. Menggunakan pendekatan idiosinkratik, secara spesifik teori *personal characteristics of political leaders* Margaret Hermann, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pembaca tentang bagaimana faktor-faktor psikologis Putin mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Argumentasi utama tulisan ini adalah bahwa faktor idiosinkratik Putin berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Rusia melalui karakternya yang bernasionalisme tinggi, memiliki keyakinan diri yang tinggi dalam mengontrol keadaan, memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi, memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi, dan memiliki tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap yang lain. Dalam konteks operasi militer khusus di Ukraina, karakter tersebut tercermin melalui sifat Putin yang agresif dan konfrontatif terhadap Barat serta kegigihannya untuk mempertahankan keamanan nasional dengan segala cara, walaupun dengan resiko pecahnya perang yang lebih besar antara Rusia dengan NATO.

Secara sederhana, periode pasca runtuhnya Uni Soviet dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode kepemimpinan Boris Yeltsin dimana Rusia mengalami masa-masa terkelamnya serta periode kepemimpinan Putin dimana beliau berhasil mendongkrak Rusia menjadi negara dominan yang disegani di dunia (Fakiolas & Fakiolas, 2009). Mengikuti disintegrasi Uni Soviet di tahun 1991, Rusia dibawah kepemimpinan Yeltsin tidak lagi menjadi salah satu dari dua negara adikuasa dunia serta kehilangan seluruh wilayah (negara) yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet kecuali Rusia. Tidak berhenti disana, perekonomian Rusia juga merosot sangat parah. Hanya dalam rentang waktu satu dekade (1989-1998), GDP Rusia turun drastis sebanyak 44 persen dan nilai ekspor turun dari \$ 208 miliar ke \$ 60 miliar (The World Bank, 1995). Hasilnya adalah angka kemiskinan, pengangguran, penggunaan alkohol, dan berbagai macam penyakit meningkat. Sebagai kontrasnya, Rusia dibawah kepemimpinan Putin menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam segala bidang. Tren penurunan perlahan-lahan berbalik dan Rusia berhasil mendapatkan kembali sebagian dari wilayahnya yang sempat hilang (Fakiolas & Fakiolas, 2009). Sejak Putin berkuasa, pertumbuhan ekonomi Rusia mencapai tujuh persen (lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan perekonomian dunia yang sebesar lima persen) dan GDP Rusia mencapai \$ 763 miliar di tahun 2005. Putin juga merombak sistem domestik Rusia dengan menindak para oligarki yang dulunya menguasai sebagian besar perekonomian dan politik.

Terkait hubungan luar negeri, Putin juga telah meningkatkan peran Rusia dalam hubungan internasional secara signifikan. Putin memanfaatkan keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB untuk mencapai kepentingan nasional: memperdalam

pengaruh di Timur Tengah dan relasi dengan Cina; menghidupkan kembali hubungan era Soviet dengan Kuba, Suriah, Mesir, Libya, dan Vietnam; menjalin persahabatan baru dengan Turki, Iran, dan Venezuela; bahkan mengubah beberapa hubungan antagonis lama menjadi persahabatan yang menjanjikan, seperti dengan Arab Saudi, UEA, Korea Selatan atau Singapura. Dari berbagai kebijakan yang ditempuh Putin terkait politik luar negeri, Grigorov (2022) berpendapat bahwa tujuan utama Putin dalam perumusan kebijakan luar negeri adalah untuk mengembalikan kebesaran dan kejayaan Rusia seperti saat Uni Soviet masih berdiri. Bagi Putin, keruntuhan dan perpecahan Uni Soviet merupakan “bencana geopolitik terbesar di abad ke-dua puluh” (Putin, 2005).

Sejak pertama kali menduduki tampuk kepresidenan, orientasi politik luar negeri Rusia dibawah Putin menunjukkan tren yang agresif dan konfrontatif, secara khusus terhadap Barat. Hal ini tercermin dari sejumlah kebijakan Putin seperti pendudukan Chechnya tahun 2000, peretasan dan kampanye disinformasi di negara-negara Baltik tahun 2007, agresi terhadap Georgia tahun 2008, aneksasi Krimea tahun 2014, hingga yang terakhir operasi militer khusus terhadap Ukraina di tahun 2022 ini. Sikap agresif yang ditunjukkan Putin secara konsisten selama lebih dari dua puluh tahun dalam menyetir politik luar negeri Rusia menunjukkan mengapa peran Putin sangatlah signifikan dalam isu operasi militer khusus terhadap Ukraina. Seperti yang dikatakan Angela Stent (2019): *“Losing the war in Ukraine would cause Putin to revise his plans to change the post-Soviet map of Europe, not abandon them. Whatever happens, this is going to be a very long, drawn-out conflict.”*

Penulis tertarik untuk meneliti operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina menggunakan pendekatan idiosinkratik karena belum ada penulisan mengenai peristiwa ini yang melibatkan faktor psikologis Putin. Analisis pengaruh faktor idiosinkratik Putin terhadap kebijakan luar negeri Rusia bukanlah hal yang baru, namun studi kasus penulisan-penulisan sebelumnya mengacu pada kebijakan Rusia lain seperti aneksasi Krimea pada tahun 2014. Terlebih lagi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis kebijakan luar negeri menggunakan pendekatan idiosinkratik sangatlah penting karena aktor yang bertanggung jawab membuat keputusan adalah manusia, bukan negara. Adanya letak kesamaan pembawaan kepribadian Putin dengan kebijakan luar negeri Rusia juga mendukung penulis menganggap konsep idiosinkratik akan lebih memuaskan untuk menjelaskan keterikatan antara keduanya. Selain itu, politik luar negeri Rusia yang kurang mencerminkan orientasi yang konfrontatif dan agresif di masa pemerintahan sebelumnya (Boris Yeltsin), ikut menandakan adanya ciri kepemimpinan Putin tersendiri yang dapat mempengaruhi kebijakan. Maka dari itu, penulisan ini juga bertujuan untuk memperkuat konsep idiosinkratik serta memberikan kontribusi riset untuk kemajuan ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam analisa kebijakan luar negeri.

Namun demikian, terdapat sejumlah klaim berbeda terkait latar belakang kebijakan Rusia terhadap Ukraina dimana Putin menyatakan kebijakan tersebut sebagai “operasi militer khusus”, sedangkan negara-negara lain menyatakannya sebagai “invasi”. Terkait narasi denazifikasi dan demiliterisasi yang dibawa Putin sebagai justifikasi melakukan operasi militer khusus, komunitas internasional tidak

mempercayai pernyataan tersebut dan sebagai gantinya menyatakan bahwa Rusia telah melanggar kedaulatan Ukraina. Snyder (2018) menjelaskan bahwa Putin menggunakan istilah denazifikasi untuk kepentingan propaganda karena istilah tersebut memiliki sentimen tertentu bagi masyarakat Rusia. Banyak orang Rusia beranggapan bahwa Nazisme merupakan ideologi yang dibawa dari Barat yang mengakibatkan pembunuhan massal terhadap banyak warga Uni Soviet, Yahudi, dan non-Yahudi. Sentimen ini kemudian memiliki hubungan dengan Ukraina dalam pandangan banyak orang Rusia karena pada satu titik dalam sejarah, sejumlah orang Ukraina membantu Nazi melakukan aksi kekejiannya.

Namun demikian, menurut Snyder, fakta tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi politik Ukraina di masa sekarang karena insiden tersebut telah terjadi lebih dari 80 tahun lalu dan kondisi politik domestik di Ukraina telah mengalami banyak perubahan. Di sisi lain, Laurentius Raymond Jr. P. Sihombing, Ph.D, seorang pakar Hukum Internasional yang sekarang mengajar di Akademi Hukum Rusia, menjelaskan bahwa istilah invasi tidak tepat untuk digunakan karena kebijakan Rusia memiliki tujuan untuk menyelamatkan komunitas Rusia di Donbas serta merespon laporan dari Badan Intelijen Rusia mengenai persiapan serangan NATO ke Rusia di tanggal 28 Februari 2022 (Sihombing, 2023). Dalam wawancara tersebut, Bapak Raymond mengatakan bahwa Putin memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus di Donbas untuk menyelamatkan orang-orang Rusia di Donbas.

Pada malam tanggal 18 Februari 2022, Intelijen Rusia (FSB) mendapat laporan bahwa NATO sudah menggerakkan 500.000 pasukannya ke perbatasan Rusia-Ukraina ke dekat Donetsk. Informasi tersebut

merupakan informasi rahasia dan hingga sekarang tidak pernah terpapar ke media publik. Setelah dua hari berpikir keras, akhirnya Putin menghadap Dewan Federasi Rusia untuk meminta izin **melaksanakan operasi militer khusus dengan tujuan menyelamatkan komunitas Rusia di Ukraina**. Pada akhirnya, Putin diberi izin untuk meningkatkan produksi alutsista dan diberi izin untuk melaksanakan operasi militer khusus sebelum diserang Amerika Serikat dan NATO (Sihombing, 2023).

Menurut interpretasi Putin sendiri, pengaruh Nazi di Ukraina masih tercermin dalam dinamika politik di Ukraina. Putin melihat bahwa pengaruh Nazi masih ditemukan di Ukraina dari bagaimana pemerintah Ukraina membentuk divisi khusus “*Galicja*” dimana divisi tersebut merupakan divisi yang berisikan sukarelawan orang-orang Ukraina didirikan oleh Nazi, bertugas di bawah komando Nazi dan berjuang secara eksklusif untuk mencapai tujuan Nazi (Putin, 2023). Putin juga menekankan bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, secara terbuka menyatakan apresiasi dan penghormatannya terhadap veteran-veteran perang yang tergabung dalam divisi tersebut (Putin, 2023). Hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadi basis pemikiran Putin mengapa beliau merasa Nazi masih memiliki pengaruh yang kuat di Ukraina. Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah “operasi militer khusus” untuk merujuk pada kebijakan Rusia terhadap Ukraina, namun akan menggunakan istilah “konflik” untuk mengelaborasi situasi yang sedang terjadi di Ukraina. Penggunaan istilah “operasi militer khusus” digunakan penulis dalam tulisan ini karena kebijakan yang akan diteliti adalah kebijakan luar negeri Rusia, dan menggunakan istilah “invasi” akan menghilangkan netralitas penulis karena akan menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pihak. Namun demikian, penggunaan istilah ini tidak akan mempengaruhi obyektivitas penulis dalam melakukan interpretasi data.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka pertanyaan utama yang timbul dan menarik untuk diteliti secara mendalam adalah:

“Bagaimana pengaruh faktor idiosinkratik Vladimir Putin terhadap pembuatan kebijakan operasi militer khusus di Ukraina tahun 2022?”

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a) Tujuan Umum:

Untuk menjelaskan operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina di tahun 2022 beserta latar belakang kedua negara tersebut dari masa ke masa.

b) Tujuan Khusus:

Untuk menjelaskan pengaruh faktor idiosinkratik Vladimir Putin terhadap penetapan kebijakan operasi militer khusus di Ukraina tahun 2022.

1.4 Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Akademis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang terutama dalam kajian konsep idiosinkratik dalam analisa kebijakan luar negeri.

b) Manfaat Praktis:

1. Untuk melengkapi tugas akhir penulis sekaligus sebagai bentuk penerapan dan pengujian teori-teori yang pernah diterima penulis pada masa perkuliahan;
2. Memenuhi persyaratan akademis yang dibebankan kepada penulis pada jenjang studi Strata 1 di Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional;
3. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para praktisi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional secara khusus dalam menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara menggunakan pendekatan idiosinkratik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Istilah *idiosyncratic* merupakan hasil penggabungan dari dua kata, yaitu *ideology* dan *syncratic* dimana pendekatan ini diadopsi dari ilmu psikologi yang dalam penerapannya telah banyak digunakan Hubungan Intenasional dalam melakukan analisis kebijakan luar negeri. Menurut Saputra (2018), *idiosyncratic*

adalah seluruh aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan, nilai, bakat, dan pengalaman yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan maupun pengambilan kebijakan (Saputra, Faktor Idiosyncratic Raul Castro Dalam Hubungan Luar Negeri Kuba-Amerika Serikat, 2018). Secara lebih singkat, Couloumbis dan Wolfe (1990) mendefinisikan faktor idiosinkratik sebagai salah satu variabel yang berkaitan dengan persepsi, citra, dan karakteristik pribadi yang dimiliki seorang pemimpin.

Pendekatan idiosinkratik sendiri diadopsi dari psikologi; bahwa kepribadian dan karakteristik akan mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya, dan kemudian diyakini bahwa kepribadian juga dapat mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan suatu negara. Dalam studi analisa kebijakan luar negeri, pengaruh faktor idiosinkratik pemimpin negara dalam pembuatan keputusan bisa dibidang paling banyak mengundang kontroversi dan perdebatan. Terlepas dari hal itu, Maoz dan Shayer (1987:567) berpendapat bahwa peran kepribadian dalam pembentukan kebijakan luar negeri tidak boleh diremehkan dan bahwa setidaknya ada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hubungan internasional yang dapat dikaitkan dengan tindakan/ide pribadi para pemimpin kunci. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa aktor yang bertanggung jawab membuat keputusan adalah manusia, bukan negara (Hudson, 2005). Dalam membuat suatu kebijakan, individu akan dipengaruhi oleh latar belakang, arus informasi yang diketahui, keinginan yang dimiliki, serta tujuan yang hendak dicapai individu tersebut. Kuatnya pengaruh seorang individu dalam proses pembuatan keputusan pada akhirnya memunculkan

istilah *idiosyncratic* dalam politik luar negeri. *Idiosyncratic* mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi seorang individu dalam pembuatan keputusan yang kemudian berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan luar negeri.

Dalam menganalisa suatu peristiwa atau kebijakan luar negeri menggunakan pendekatan idiosinkratik, perlu dipahami bahwa terdapat kondisi-kondisi sistemik tertentu yang bisa membuat kepribadian/karakter seorang pemimpin negara lebih berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri dibandingkan beberapa kondisi-kondisi lainnya. Jensen (1982) mengemukakan bahwa pendekatan idiosinkratik akan kurang cocok digunakan untuk menganalisa kebijakan-kebijakan negara demokrasi karena pengaruh yang dihasilkan oleh seorang individu dalam pembuatan kebijakan tidaklah total. Di sisi lain, menurut Jensen pendekatan idiosinkratik akan lebih cocok digunakan untuk menganalisa kebijakan-kebijakan negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter/totaliter. Dalam sistem pemerintahan totaliter, individu akan memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan-kebijakan (Saputra, 2018). Dalam penulisan ini, Rusia yang mencerminkan ciri-ciri pemerintahan yang totaliter seperti pengendalian infrastruktur/fasilitas yang terpusat, pemilihan umum yang bersifat kaku dan bisa ditebak, tidak adanya jaminan kebebasan sipil, tidak adanya kebebasan untuk membentuk suatu organisasi/kelompok/partai politik untuk bersaing dengan kelompok *incumbent*, tercermin dalam dinamika politik dalam negeri Rusia dibawah kepemimpinan Putin (Sakwa, 2004). Walaupun “diatas kertas” Rusia merupakan negara demokrasi federal, tetapi implementasi

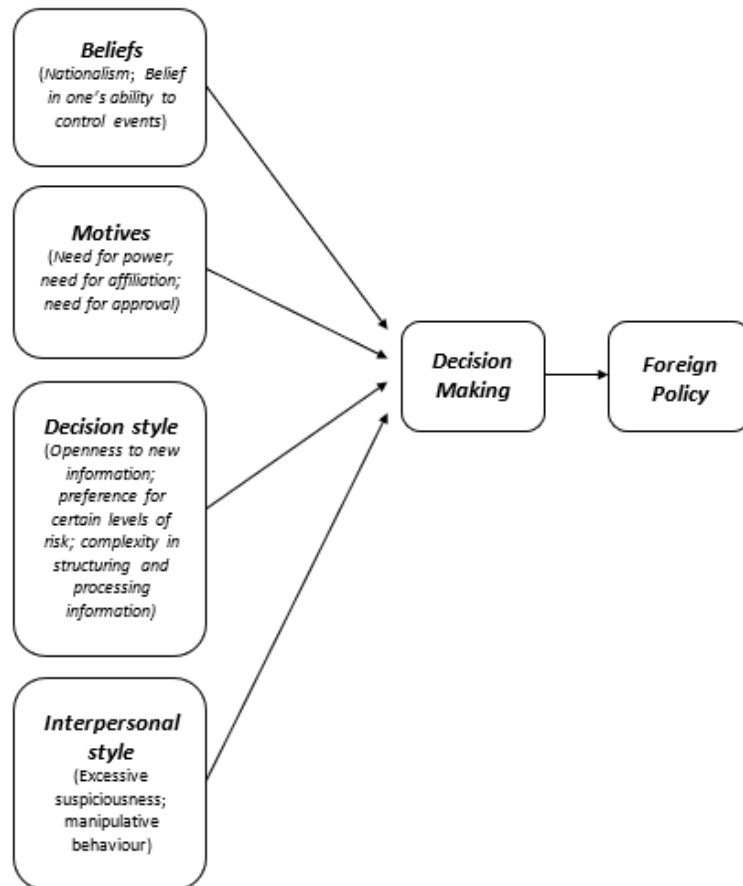
demokrasi di negara tersebut dapat dikategorisasikan sebagai *flawed democracy* berdasarkan fakta-fakta yang dapat ditemukan di lapangan.

Teori yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah teori *personal characteristics of political leaders* milik Margaret Hermann (1980). Hermann mengemukakan bahwa menganalisa kepribadian pemimpin negara dapat membuka peluang bagi para pejabat negara, pengamat politik, akademisi, dan penulis untuk memprediksi kebijakan-kebijakan apa yang mungkin diambil pemimpin tersebut di masa mendatang (Hermann, 1980). Menurut Hermann (1980), hal ini memungkinkan karena karakteristik-karakteristik yang diteliti akan membentuk suatu orientasi atau pola-pola perilaku seseorang dalam menanggapi peristiwa eksternal yang terjadi di sekelilingnya. Orientasi pribadi inilah kemudian diubah oleh kepala pemerintahan menjadi orientasi umum urusan luar negeri. Dengan mengetahui orientasi kepala pemerintahan terhadap urusan luar negeri, seseorang akan bisa menganalisa kecenderungan kepala pemerintahan tersebut dalam berperilaku dan membuat keputusan ketika dihadapkan pada tugas pembuatan kebijakan luar negeri (Hermann, 1980).

Menurut Hermann, terdapat enam karakteristik individu yang dinilai paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dimana diantaranya adalah nasionalisme (*nationalism*), keyakinan diri dalam mengontrol keadaan (*belief in one's control over events*), kebutuhan akan kekuasaan (*need for power and influence*), kebutuhan akan afiliasi atau hubungan (*need for affiliation*), kompleksitas konseptual (*conceptual complexity*), dan tingkat ketidakpercayaan

terhadap pihak-pihak lain (*excessive suspiciousness or distrust of others*). Karakteristik-karakteristik tersebut kemudian dapat dikategorikan lagi menjadi empat tipe karakteristik pribadi pada individu, yaitu keyakinan (*beliefs*), motif (*motives*), gaya pengambilan keputusan (*decision style*), dan gaya interpersonal (*interpersonal style*). Menurut Hermann dan didukung oleh banyak pakar psikologi lainnya, keempat tipe karakteristik inilah yang paling berpengaruh terhadap cara seorang pemimpin membuat keputusan maupun kebijakan.

Berdasarkan empat tipe karakteristik tersebut, Hermann dan Falkowski kemudian mengkategorikan lima sifat-sifat pengambil keputusan, yaitu *expansionist*, *active independent*, *influential*, *mediator*, *opportunist*, dan *participative* (Falkowski, 1979):



Personal Characteristics of Political Leaders (Hermann, 1980)

Pertama, *beliefs* atau keyakinan mengacu pada asumsi dasar pemimpin negara terhadap dunia secara keseluruhan. Apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi bisa diprediksi, apakah konflik didasarkan pada interaksi antar manusia, apakah seseorang bisa mengontrol peristiwa-peristiwa tertentu, apakah kedaulatan dan keamanan nasional merupakan tujuan terpenting yang harus dicapai sebuah negara? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menggambarkan keyakinan-keyakinan yang dimiliki seorang pemimpin negara. *Beliefs* dapat mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin menginterpretasikan suatu peristiwa, yang pada akhirnya akan mempengaruhi strategi/keputusan apa yang sebaiknya ditempuh

untuk merespon peristiwa tersebut. Dua contoh karakteristik individu yang mencerminkan *beliefs* adalah nasionalisme (*nationalism*) serta keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuannya untuk mengontrol peristiwa tertentu (*belief in one's own control over events*). Menurut Falkowski (1979), nasionalisme merupakan keterikatan emosi yang dimiliki seorang pemimpin terhadap bangsanya, dimana hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana seorang pemimpin merasa bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan negaranya; kebanggaan seorang pemimpin terhadap warga negara dan tanah airnya; serta semangat untuk menjaga dan mempertahankan kehormatan negara tersebut. Hermann (1980) mengemukakan bahwa rasa nasionalisme berkaitan erat dengan kebutuhan kekuasaan seorang pemimpin dan tingkat ketidakpercayaannya terhadap pihak lain dimana biasanya seorang pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme tinggi akan juga memiliki tingkat kebutuhan kekuasaan yang tinggi dan juga menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap pihak lain.

Terkait keyakinan pemimpin terhadap kemampuannya untuk mengontrol suatu peristiwa, indikator utama karakter tersebut berkaitan dengan keyakinan yang dimiliki pemimpin terhadap pandangan dunia dan bagaimana para pemimpin merasakan seberapa besar kendali yang dimilikinya terhadap situasi yang terjadi (Hermann, 1999). Pemimpin yang memiliki keyakinan tinggi dalam mengontrol suatu peristiwa akan cenderung merasa percaya diri bahwa mereka bisa mempengaruhi dunia; menganggap bahwa mereka adalah aktor politik yang berpengaruh; dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap keberhasilan-keberhasilan mereka (Dyson, 2006). Dalam membuat kebijakan dan mengambil

keputusan, seorang pemimpin akan merasa yakin bahwa mereka bisa mempengaruhi dunia melalui kebijakannya tersebut; memastikan keputusan tersebut benar-benar diimplementasikan; dan mereka akan mempertahankan kontrol atasnya (Hermann, 1999).

Pemimpin yang memiliki keyakinan tinggi untuk mengontrol suatu peristiwa akan cenderung lebih memfokuskan ucapannya pada aksi atau tindakan yang mereka lakukan sehingga bisa memberikan cerminan bahwa mereka memegang kendali dalam pelaksanaan kebijakan. Karena seorang pemimpin yang seperti ini sangatlah yakin mereka bisa mempengaruhi dunia, mereka akan cenderung kurang ingin berkompromi atau bernegosiasi dengan pihak lain. Ketika mereka telah memutuskan sesuatu, mereka memiliki kepercayaan yang sangat tinggi akan keputusan yang telah diambilnya – mereka mengetahui dan akan memastikan apa yang seharusnya terjadi dan dilakukan (Hermann, 1999). Sebaliknya, pemimpin dengan tingkat keyakinan yang rendah terhadap kemampuannya mengontrol situasi akan lebih reaktif dalam merespon suatu peristiwa; mereka akan lebih cenderung mengamati dan menunggu bagaimana pihak-pihak lain merespon sebelum memutuskan apa yang ingin dilakukannya (Hermann, 1999). Pemimpin-pemimpin dengan karakter ini akan cenderung kurang berinisiatif, lebih memilih mempercayakan orang lain untuk mengemban tanggung jawab atas situasi yang terlalu menegangkan, dan berharap bahwa orang lain dapat memiliki pengaruh yang lebih dalam mengubah hasil akhir suatu keadaan.

Kedua, *motives* atau motif menjelaskan mengapa seorang pemimpin berperilaku, atau mengapa seorang pemimpin menempuh kebijakan tertentu.

Beberapa contoh motif pemimpin negara yang paling banyak diperbincangkan adalah kebutuhan akan kekuasaan (*need for power and influence*), kebutuhan akan hubungan/relasi (*need for affiliation*), dan kebutuhan akan penerimaan (*need for approval*) juga merupakan contoh-contoh motif yang banyak ditemukan dalam penulisan-penulisan kontemporer. Sama halnya dengan keyakinan (*beliefs*), motif (*motives*) dapat mempengaruhi bagaimana pemimpin menginterpretasikan suatu peristiwa yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri.

Kebutuhan akan kekuasaan (*need for power and influence*) mengindikasikan adanya keinginan dari seorang pemimpin untuk mendirikan, mempertahankan, atau mengembalikan kekuasaan, atau dengan kata lain, memiliki hasrat untuk mengontrol atau memberikan pengaruh terhadap aktor lain (Hermann, 1999). Dalam perkataannya, pemimpin dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi akan menggunakan kata-kata yang mencerminkan adanya hasrat tersebut; memberikan pernyataan-pernyataan yang memaksa, tuduhan-tuduhan, ancaman-ancaman verbal; berusaha untuk mempersuasi atau beradu argumen dengan pihak lain selama tujuan akhirnya adalah tidak untuk mencapai konsensus (Hermann, 1999). Ketika kebutuhan akan kekuasaan suatu pemimpin tinggi, mereka sangat mahir untuk memanipulasi lingkungan untuk mendapatkan kontrol, dukungan, dan pengaruh untuk tampak sebagai pemenang; mereka pandai dalam membaca situasi dan menentukan strategi apa yang paling tepat untuk bisa mengontrol situasi tersebut; kebanyakan pemimpin dengan karakter ini terlihat sangat berwibawa dan berkharisma karena kepandaiannya dalam bertutur kata dan berperilaku untuk

mendapatkan dukungan dari rakyatnya (Hermann, 1999). Sebagai kontrasnya, pemimpin dengan kebutuhan akan kekuasaan yang rendah akan merasa bahwa mereka tidak seharusnya terlalu dominan dalam memimpin; mereka tidak masalah menjadi salah satu dari beberapa individu yang sama-sama dapat memberikan pengaruh; dan mereka cenderung tidak akan berkeberatan untuk mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan kelompok (Hermann, 1999). Pemimpin dengan karakter ini dapat membuat orang-orang di sekelilingnya merasa termotivasi dan terdorong secara moral dan tanggung jawab untuk terus mengusahakan tujuan akhir kelompok; intensi mereka adalah untuk membangun relasi yang didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab (Hermann, 1999).

Karakter ini banyak terkait dengan indikator karakter sebelumnya dimana kepercayaan pemimpin untuk mengontrol peristiwa (*belief in one's ability to control events*) serta kebutuhannya akan kekuasaan (*need for power and influence*) akan berpengaruh terhadap bagaimana pemimpin tersebut merespon hambatan-hambatan yang dihadapinya; apakah seorang pemimpin akan menerima (*accept and respect*) atau menantang (*challenge*) hambatan-hambatan tersebut (Hermann, 1999). Para pemimpin yang memiliki keyakinan tinggi bahwa mereka dapat mengendalikan apa yang terjadi dan membutuhkan kekuasaan, terbukti mampu menantang dan mendorong batasan-batasan yang ada di lingkungan mereka. Para pemimpin ini bertanggung jawab dan terampil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengupayakan cara-cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di sisi lain, pemimpin dengan tingkat yang rendah dalam dua indikator ini akan menghormati, atau setidaknya menyetujui, batasan-batasan yang mereka

rasakan di lingkungan mereka dan bekerja dalam parameter tersebut untuk mencapai tujuan mereka.

Pemimpin yang moderat dalam kedua indikator kepribadian ini mempunyai kemampuan untuk menghadapi tantangan atau menghormati batasan tergantung pada situasinya. Namun bagaimana jika seorang pemimpin memiliki sifat yang tinggi dalam satu indikator, namun rendah hingga moderat dalam indikator lainnya? Pemimpin yang memiliki keyakinan tinggi bahwa mereka dapat mengendalikan peristiwa namun memiliki tingkat kebutuhan akan kekuasaan yang rendah akan mengambil kendali atas apa yang terjadi dan menantang kendala, namun mereka tidak akan mampu membaca situasi dan orang lain serta mengatur di balik layar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Para pemimpin dengan karakter seperti ini tidak akan bisa maksimal memberikan pengaruh ke lingkungan mereka dibandingkan dengan seorang pemimpin yang memiliki tingkat yang tinggi dalam kedua indikator tersebut karena mereka akan cenderung terlalu lugas dan terbuka dalam menggunakan kekuasaannya. Dan bagaimana dengan para pemimpin yang memiliki keyakinan rendah bahwa mereka dapat mengendalikan keadaan namun sangat membutuhkan kekuasaan? Orang-orang ini juga akan menantang batasan-batasan namun mereka akan lebih nyaman melakukannya di belakang layar; secara tidak langsung dibandingkan secara terbuka. Para pemimpin seperti ini sangat baik dalam situasi di mana mereka adalah “kekuatan di balik takhta,” di mana mereka dapat mengambil alih kendali namun kurang bertanggung jawab atas hasilnya.

Ketiga, *decision style* atau gaya pembuatan keputusan mengacu pada metode-metode pengambilan keputusan tertentu yang disukai atau sering dilakukan

pemimpin negara. Bagaimana pemimpin negara seringkali membuat keputusannya? Adakah cara-cara tertentu yang menjadi ciri khas pemimpin negara dalam merespon suatu peristiwa? Apakah seorang pemimpin cenderung mengambil keputusan cepat secara individu ataukah kolektif dengan mempertimbangkan opini-opini bawahannya? Beberapa komponen yang dapat dianalisa dalam *decision style* adalah keterbukaan pemimpin terhadap informasi baru, tingkat toleransi terhadap resiko, serta toleransi terhadap ambiguitas. Menurut Hermann (1999), pemimpin-politik akan cenderung memiliki perbedaan dalam tingkat keterbukaannya terhadap informasi berdasarkan level kepercayaan diri (*self-confidence*) dan kompleksitas konseptualnya (*conceptual complexity*). Indikator kompleksitas konseptual sendiri berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam membedakan berbagai dimensi lingkungan pada saat mendeskripsikan aktor, tempat, ide, dan situasi (Batubara, Rosyidin, & Hanura, 2021).

Menurut Hermann (dikutip dalam Batubara, Rosyidin, & Hanura, 2021), individu dengan tingkat kompleksitas konseptual yang tinggi akan cenderung dapat melihat berbagai alasan untuk posisi tertentu; mereka menerima kemungkinan adanya ambiguitas dalam suatu peristiwa; dan mereka lebih fleksibel dalam merespon atau bereaksi terhadap ide. Seorang pemimpin dengan tingkat kompleksitas konseptual yang tinggi akan dapat memandang dunia politik secara lebih bernuansa; tidak terpaku pada satu ide atau konsep mengenai suatu peristiwa atau orang lain; dan menerima berbagai faktor yang relevan untuk mengambil sebuah keputusan (Hermann, 1999). Sebaliknya, pemimpin dengan tingkat kompleksitas konseptual yang rendah akan cenderung memetakan suatu peristiwa

secara dikotomi, yaitu baik-buruk, hitam-putih, atau melibatkan dimensi ‘*either-or*’; mereka akan lebih kesulitan dalam menerima adanya ambiguitas di lingkungan; dan kurang fleksibel dalam bereaksi terhadap suatu peristiwa (Hermann, 1999). Menurut Ziller dan kolega-koleganya (1977), kepercayaan diri (*self-confidence*) dan kompleksitas konseptual (*conceptual complexity*) saling terkait dan membentuk apa yang disebutnya sebagai ‘*a self-other orientation*’ atau orientasi seorang pemimpin terhadap pihak lain. Orientasi ini mengindikasikan seberapa terbuka seorang pemimpin dalam menerima masukan atau input dari pihak lain ataupun lingkungan politik secara umum dalam membuat suatu kebijakan (Hermann, 1999).

Keempat dan yang terakhir adalah *interpersonal style* atau gaya interpersonal. Gaya interpersonal mencerminkan bagaimana pemimpin negara berinteraksi dengan aktor-aktor di sekelilingnya, mulai dari sesama pembuat kebijakan dan terhadap negara lain (Hermann, 1999). Menurut Christie dan Geis (1970), beberapa contoh gaya interpersonal yang paling banyak ditemui pada pemimpin-pemimpin negara adalah paranoia yang dicirikan dengan kecurigaan yang berlebih (*excessive suspiciousness*), ketidakpercayaan terhadap pihak lain (*distrust of others*), serta Machiavellianism yang dicirikan dengan perilaku manipulatif. Tucker (1965) mengatakan bahwa tiga gaya interpersonal tersebut banyak dijumpai di pemimpin-pemimpin negara yang dikategorikan memiliki “*warfare personality*” seperti Joseph Stalin dan Adolf Hitler. Menurut Hermann (1999) sendiri, pemimpin yang memiliki tingkat kecurigaan berlebih terhadap pihak lain, memiliki tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap pihak lain, atau memiliki sifat manipulatif akan banyak mempertanyakan atau mencurigai motif

dan tindakan orang lain, terutama pada pihak-pihak yang dianggap pesaing atau musuhnya karena bertentangan dengan tujuan atau ideologi mereka (Hermann, 1999). Alhasil, mereka akan menilai bahwa segala yang dilakukan orang lain adalah tidak benar; mereka akan beranggapan bahwa apapun yang dilakukan orang lain didasari motif dan intensi terselubung (Hermann, 1999). Dengan demikian, pemimpin yang memiliki karakter ini akan cenderung sangat sensitif terhadap kritik, atau menganggap kritik sebagai sesuatu yang menantang otoritas atau diri mereka (Batubara, Rosyidin, & Hanura, 2021). Sebaliknya, pemimpin yang memiliki tingkat ketidakpercayaan yang rendah terhadap orang lain tidak akan penuh kecurigaan terhadap pihak lain dan akan cenderung melihatnya dari perspektif lain.

Berdasarkan konsep idiosinkratik Hermann, empat tipe karakteristik individu tersebut (keyakinan, motif, gaya pembuatan keputusan, dan gaya interpersonal) ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Karena keyakinan (*beliefs*) dan motif (*motives*) berpengaruh terhadap bagaimana seorang pemimpin menginterpretasikan lingkungan sekitarnya (kognisi), seorang pemimpin akan cenderung mendorong pemerintah mereka untuk berperilaku sesuai dengan interpretasi tersebut (George, 1969). Terkait gaya kepemimpinan (*decision style*) dan gaya interpersonal (*interpersonal style*), Hermann berasumsi bahwa seorang pemimpin akan cenderung memiliki perilaku-perilaku yang serupa dalam gaya kepemimpinan serta cara berinteraksi dengan pembuat keputusan lain. Sebagai contohnya, pemimpin yang baru terpilih biasanya akan memiliki gaya kepemimpinan yang terbuka dan melibatkan birokrasi-

birokrasi lain yang berwenang untuk ambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan. Di sisi lain, pemimpin-pemimpin sebelumnya bisa jadi hanya melibatkan segelintir aktor saja dalam proses pembuatan keputusan.

Berdasarkan empat tipe karakteristik tersebut, Hermann dan Falkowski kemudian mengkategorikan lima sifat-sifat pengambil keputusan, yaitu *expansionist*, *active independent*, *influential*, *mediator*, *opportunist*, dan *participative* (Falkowski, 1979). Penjelasan dan penjabaran mengenai masing-masing sifat adalah sebagai berikut:

1. *Expansionist*

Individu tidak ingin kehilangan kendali. Memiliki keinginan yang lebih besar untuk memegang kendali (keinginan yang tinggi akan kekuasaan dan pengaruh), memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk mengenali adanya beberapa alternatif pilihan pengambilan keputusan (kompleksitas konseptual yang rendah), dan memiliki ketidakpercayaan terhadap orang lain (ketidakpercayaan yang tinggi terhadap orang lain). Namun individu yang berkepribadian nasionalis mempunyai keinginan yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa (nasionalisme tinggi). Individu tidak menghargai pentingnya persahabatan (kebutuhan yang rendah untuk memiliki) dan memiliki tingkat inisiatif yang tinggi (kepercayaan diri yang tinggi dalam mengendalikan peristiwa). Orang tipe ini akan cenderung tidak takut untuk menggunakan agresi dalam mencapai tujuannya.

2. *Active Independent*

Tipe orang seperti ini memiliki keinginan yang kuat untuk berpartisipasi dalam komunitas internasional tanpa membahayakan hubungan yang sudah ada dengan negara lain. Individu berusaha mempertahankan koneksi dan hubungan sebanyak mungkin. Ciri-ciri yang termasuk dalam kelompok ini adalah nasionalisme yang tinggi, kompleksitas konseptual yang tinggi, ketidakpercayaan yang rendah terhadap orang lain, kepercayaan yang tinggi terhadap kendali diri sendiri, kebutuhan yang tinggi akan rasa memiliki, dan rendahnya keinginan akan kekuasaan dan pengaruh.

3. *Influential*

Individu berusaha untuk menjadi pusat dari lingkungannya dan memiliki kemauan serta keinginan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain. Pemimpin dengan kepribadian ini memastikan bahwa tujuan mereka adalah yang terpenting dibandingkan pemimpin lainnya. Ciri-cirinya antara lain nasionalisme yang rendah, kompleksitas konseptual yang rendah, ketidakpercayaan yang rendah terhadap orang lain, kepercayaan diri yang tinggi terhadap kendali diri sendiri, kebutuhan yang tinggi akan rasa memiliki, dan keinginan yang tinggi akan kekuasaan dan pengaruh.

4. *Mediator*

Karakter unik ini sering kali mendamaikan perbedaan antar negara dan bertindak sebagai “mediator”. Para pemimpin memandang negaranya

sebagai perwujudan perdamaian dunia dan selalu berupaya menyelesaikan permasalahan dunia. Ciri-cirinya antara lain nasionalisme yang rendah, kompleksitas konseptual yang tinggi, ketidakpercayaan yang rendah terhadap orang lain, keyakinan yang kuat pada kendali pribadi, kebutuhan yang kuat akan rasa memiliki, dan keinginan yang kuat akan kekuasaan dan pengaruh. Umumnya, pemimpin seperti ini lebih suka bertindak di belakang layar. Hindari intervensi meskipun hal itu berdampak pada negara lain.

5. *Opportunist*

Orang yang berusaha tampil cerdas dan memanfaatkan situasi saat ini. Para pemimpin seperti ini biasanya mengambil kebijakan berdasarkan apa yang mereka yakini perlu dan jarang mengabaikan komitmen ideologis. Ciri-cirinya antara lain rendahnya nasionalisme, kompleksitas konseptual yang tinggi, rendahnya ketidakpercayaan terhadap orang lain, rendahnya kepercayaan terhadap kendali pribadi, rendahnya kebutuhan akan rasa memiliki, dan rendahnya kebutuhan akan kekuasaan dan pengaruh.

6. *Participative*

Ia memiliki keinginan untuk mempromosikan keterlibatan negara di kancah internasional. Orang-orang ini tertarik untuk menemukan hal-hal yang bernilai bagi negara dan mencari alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi negara lain. Hal ini ditandai dengan rendahnya nasionalisme, kompleksitas konseptual yang tinggi, rendahnya ketidakpercayaan terhadap orang lain, rendahnya kepercayaan terhadap

kendali diri sendiri, tingginya kebutuhan akan rasa memiliki, dan rendahnya kebutuhan akan kekuasaan dan pengaruh (Falkowski, 1979).

Margaret Herman & Falkowski (1979)							
Types of personal characteristics		Expansionist	Active Independent	Influential	Mediator	Opportunist	Participative
Beliefs	Nationalism	high nationalism	high nationalism	low nationalism	low nationalism	low nationalism	low nationalism
	Belief in one's own ability to control events	high believe in control over events	high believe in control over events	high believe in control over events	high believe in control over events	high believe in control over events	high believe in control over events
Motives	Need for power and influence	high in need for power and influence	low need for power and influence	high need for power and influence	high need for power and influence	low need for power and influence	low need for power and influence
	Need for affiliation	low need for affiliation	high need for affiliation	high need for affiliation	high need for affiliation	low need for affiliation	high need for affiliation
Decision style	Complexity in structuring and processing information	low conceptual complexity	high conceptual complexity	low conceptual complexity	high conceptual complexity	high conceptual complexity	high conceptual complexity
Interpersonal style	Excessive suspiciousness/distrust	high distrust of others	low distrust of others	low distrust of others	low distrust for others	low distrust of others	low distrust of others

1.6 Operasionalisasi Konsep

Tiga konsep utama yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah konsep kebijakan luar negeri, konsep idiosinkratik, dan konsep karakteristik

individu (*personal characteristics*). Terkait konsep kebijakan luar negeri, Rosenau, Boyd, dan Thompson (1976) mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai upaya negara melalui keseluruhan aktivitas dan perilakunya untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternal untuk mempertahankan kelangsungannya. Selanjutnya, Frankle (1968) menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan luar negeri melibatkan hubungan yang kompleks antar berbagai aktor baik dari aktor-aktor pembuat kebijakan dan antar satu negara dengan negara lainnya.

Menurut Holsti (2000), terdapat lima variabel penting yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan luar negeri, yaitu variabel individu, variabel grup, variabel birokrasi, variabel nasional, dan variabel global. Pengaruh variabel individu dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara akan semakin besar ketika pengaruh individu tersebut dalam proses pembuatan keputusan adalah total. Variabel individu sendiri tidak lepas dari berbagai faktor yang terdapat dalam diri seorang pemimpin negara, salah satu faktor yang terdapat dalam individu adalah faktor idiosinkratik.

Dalam penulisan ini, kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibentuk individu, kelompok, maupun koalisi yang mempengaruhi perilaku negara di kancah internasional (Mintz & deRouen, 2010). Penulisan ini juga akan berfokus pada analisis faktor-faktor psikologis aktor yang berperan dalam pembuatan keputusan, secara spesifik pengaruh faktor idiosinkratik Putin terhadap keputusan Rusia

menetapkan kebijakan operasi militer khusus Ukraina. Diantara sejumlah determinan yang dapat mempengaruhi penetapan kebijakan, faktor psikologis aktor-aktor yang berperan dalam pembuatan keputusan merupakan salah satu faktor penting yang juga perlu dipertimbangkan (Holsti, 2000). Hal ini dikarenakan fakta bahwa aktor yang bertanggung jawab membuat keputusan adalah manusia, bukan negara (Hudson: 2005). Aktor-aktor individu yang menjalankan negara seperti presiden, perdana menteri, dan anggota-anggota kabinet memiliki karakter/kepribadian berbeda-beda yang memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Melibatkan faktor idiosinkratik aktor-aktor tersebut dalam studi analisa kebijakan luar negeri sangatlah penting untuk memahami secara lebih komprehensif tentang mengapa dan bagaimana suatu negara menempuh kebijakan tertentu.

Konsep kedua yang digunakan adalah konsep idiosinkratik. Rosenau (1996) mendefinisikan idiosinkratik sebagai seluruh aspek kepribadian seseorang yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan: nilai-nilai yang dianut, bakat, pengalaman-pengalaman hidup, dan seluruh aspek lain yang membedakan perilaku seseorang dengan setiap pembuat keputusan lainnya. Dalam studi analisa kebijakan luar negeri, pendekatan idiosinkratik dapat digunakan ketika pengaruh yang dihasilkan oleh seorang individu dalam pembuatan kebijakan adalah total. Dengan menganalisa faktor-faktor idiosinkratik seperti karakteristik individu (*personal characteristics*) dan kepribadian seorang pemimpin negara, prediksi

mengenai pengambilan keputusan sebuah kebijakan luar negeri dapat tercipta. Hal tersebut memungkinkan karena karakteristik-karakteristik yang diteliti akan membentuk suatu orientasi atau pola-pola perilaku seseorang dalam menanggapi peristiwa eksternal yang terjadi di sekelilingnya. Orientasi pribadi inilah kemudian diubah oleh pemimpin negara menjadi orientasi umum urusan luar negeri (Hermann, 1980).

Dalam penulisan ini, definisi idiosinkratik yang akan digunakan adalah definisi dari Saputra (2018) yang mendeskripsikan bahwa idiosinkratik adalah semua aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan, nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan. Dalam analisa kebijakan luar negeri, pendekatan idiosinkratik dapat digunakan ketika pengaruh yang dihasilkan oleh seorang individu dalam pembuatan kebijakan adalah total. Ketika mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan luar negeri, individu dipengaruhi oleh latar belakang mereka, arus informasi yang diketahui, aspirasi, dan tujuan yang ingin mereka capai. Kuatnya pengaruh individu terhadap proses pengambilan keputusan pada akhirnya memunculkan istilah idiosinkratik dalam politik luar negeri.

Namun demikian, terdapat kondisi-kondisi sistemik tertentu yang bisa membuat kepribadian/karakter seorang pemimpin negara lebih berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri dibandingkan beberapa kondisi-kondisi lainnya, misalnya negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter/totaliter, negara-negara berkembang, negara-negara

dengan pengaruh birokrasi yang lemah, adanya pemimpin negara yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu internasional, dan lain sebagainya (Hermann, Preston, Korany, & Shaw, 2001). Kondisi-kondisi sistemik tersebut bisa berupa kondisi apapun yang mendukung dominasi satu individu dalam proses pembuatan keputusan suatu negara. Dalam penulisan ini, pendekatan idiosinkratik cocok untuk digunakan karena kondisi-kondisi sistemik yang memperbesar pengaruh Putin dalam perumusan kebijakan-kebijakan luar negeri tercermin dengan jelas dari segi sistem pemerintahan dan birokrasi Rusia.

Konsep terakhir yang digunakan adalah konsep karakteristik individu (*personal characteristics*). Menurut Rehman (2013), kepribadian membentuk karakteristik-karakteristik penting dari individu serta caranya berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Karakteristik-karakteristik unik tersebut sering dikenal dengan istilah *personal traits* dimana menurut McCrae dan Costa *personal traits* didefinisikan sebagai dimensi-dimensi yang unik pada setiap individu yang menunjukkan pola-pola pemikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten (Widiger & Costa, 2001). Seseorang dapat memiliki kepribadian yang cenderung mudah bergaul atau pemalu, pasif atau agresif, dan optimis atau pesimis. Contoh-contoh tersebut serta keseluruhan perilaku, sifat, dan perasaan yang tercermin dari seseorang secara konsisten dalam waktu yang lama bisa dikategorikan sebagai *personality traits*. Maka dari itu, setiap orang memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda dimana masing-masing

individu memiliki pola-pola perilaku tertentu yang dicerminkan di seluruh situasi dan dalam waktu yang lama (McCrae & Costa, 1987).

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan teori *personal characteristics of political leaders* milik Margaret Hermann (1980) untuk mengidentifikasi karakteristik, kualitas, atribut, dan fitur pribadi Putin yang menjadi ciri khasnya. Menurut Hermann (1980), karakteristik-karakteristik individu yang berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan luar negeri adalah keyakinan (*beliefs*), motif (*motives*), gaya kepemimpinan (*leadership style*), serta gaya berinteraksi (*interpersonal style*). Penjabaran mengenai karakteristik-karakteristik tersebut secara lebih mendalam adalah sebagai berikut:

- a) *Beliefs* atau keyakinan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah keyakinan-keyakinan pribadi Putin terhadap dunia dan persoalan politik yang mempengaruhi keputusannya untuk menetapkan kebijakan operasi militer khusus Ukraina. Salah satu contohnya adalah keyakinan Putin bahwa negara-negara Barat secara khusus Amerika Serikat dan NATO melakukan ekspansi dengan tujuan mencapai dominasi global dan bahwa Rusia bisa menjadi target selanjutnya bila mereka tidak melakukan tindakan balasan.
- b) *Motives* atau motif dalam penulisan ini mengacu pada hal-hal tertentu baik secara fisiologis maupun psikologis yang

mendorong Putin menetapkan kebijakan operasi militer khusus Ukraina. Salah satu motif Putin yang bahkan diutarakannya secara pribadi di berbagai media adalah keinginannya untuk mengembalikan kejayaan dan kebesaran Rusia seperti pada masa Uni Soviet.

- c) *Decision style* mengacu pada gaya pembuatan keputusan Putin selama beliau menjabat sebagai presiden Rusia dimana ciri khas tersebut juga tercermin dalam keputusannya menetapkan kebijakan operasi militer khusus Ukraina. Beberapa komponen yang dapat dianalisa dalam *decision style* adalah keterbukaan pemimpin terhadap informasi baru, tingkat toleransi terhadap resiko, serta toleransi terhadap ambiguitas (Hermann, *Explaining Foreign Policy Behaviour Using the Personal Characteristics of Political Leaders*, 1980).
- d) Terakhir, *interpersonal style* dalam penulisan ini mengacu pada gaya interaksi Putin dengan orang-orang di sekitarnya, baik bawahan, orang-orang terdekatnya, hingga pemimpin negara-negara lain (Hermann, *Explaining Foreign Policy Behaviour Using the Personal Characteristics of Political Leaders*, 1980). Dua gaya interaksi yang paling banyak ditemui pada pemimpin-pemimpin negara adalah paranoia yang dicirikan dengan kecurigaan yang berlebih serta

Machiavellianism yang dicirikan dengan perilaku manipulatif.

1.7 Argumen Penulisan

Argumen utama penulisan ini adalah bahwa kepribadian Putin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan Rusia menetapkan operasi militer khusus Ukraina melalui kepribadiannya yang dicirikan dengan adanya karakter: nasionalisme yang tinggi, keyakinan untuk mengontrol peristiwa yang tinggi, keinginan akan kekuasaan yang tinggi, tingkat kompleksitas yang rendah, dan memiliki tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap yang lain. Dalam konteks operasi militer khusus di Ukraina, karakter tersebut tercermin melalui ketegasan Putin dalam merespon perilaku NATO serta kegigihannya untuk mempertahankan keamanan nasional Rusia dengan segala cara, walaupun dengan resiko pecahnya perang yang lebih besar antara Rusia dengan NATO.

1.8 Metode Penulisan

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, secara spesifik metode studi kasus (*case studies*). Bong dan Taylor mendefinisikan penulisan kualitatif sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sawitri, Nurtjahjanti, & Prasetyo, 2019). Selanjutnya, metode studi kasus

merupakan salah satu jenis penulisan kualitatif yang meneliti secara mendalam satu konteks tertentu, baik berupa individu, kelompok, organisasi, program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas (Sawitri, Nurtjahjanti, & Prasetyo, 2019).

1.8.1 Tipe Penulisan

Penulisan ini akan bersifat eksplanatif untuk menjelaskan pengaruh faktor idiosinkratik Putin terhadap kebijakan Rusia menetapkan operasi militer khusus Ukraina. Penulisan eksplanatif adalah penulisan yang ditujukan untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antara dua atau lebih gejala, fenomena atau variabel.

1.8.2 Situs Penulisan

Penulisan ini akan dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan metode *desk research*.

1.8.3 Subjek Penulisan

Subyek dalam penulisan ini adalah Vladimir Putin yang merupakan Presiden Rusia. Penulis akan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik individu Putin yang kemudian akan dianalisis pengaruh serta implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Rusia, secara khusus kebijakan operasi militer khusus Rusia di Ukraina pada tahun 2022.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada data yang berbentuk kata-kata atau verbal yang menunjukkan ciri khas kepribadian Putin.

1.8.5 Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis akan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya seperti transkrip wawancara, dokumen resmi, dan teks pidato. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber pihak ketiga seperti buku, jurnal, laporan penulisan, artikel, dan media-media lainnya yang kredibel.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penulisan ini adalah *desk research* melalui buku, jurnal, artikel, wawancara (*interview*), dan media-media yang kredibel. Narasumber wawancara dalam penulisan adalah Bapak Muhammad Arief Basalamah selaku Duta Besar RI untuk Ukraina dan Bapak Laurentius Raymond Jr. P. Sihombing, Ph.D, seorang pakar Hukum Internasional yang sekarang mengajar di Akademi Hukum Rusia. Wawancara dengan Bapak Muhammad Arief Basalamah dilakukan secara tertulis melalui *email*, sedangkan wawancara dengan Bapak Raymond dilakukan secara daring melalui *platform* Zoom pada Selasa, 5 Desember, 2023. Wawancara dengan KBRI Ukraina dilakukan secara tertulis karena perbedaan waktu yang sangat signifikan antara Indonesia dan Ukraina.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan teknik *qualitative content analysis* untuk menilai karakteristik dan kepribadian Putin yang menjadi subyek utama penulisan ini. *Content analysis* sejatinya merupakan teknik analisis kuantitatif yang menganalisis data-data empirik/objektif dari teks untuk mengidentifikasi makna, tema, atau pola yang mungkin terwujud atau terpendam dari teks tersebut (Zhang & Wildemuth, 2009). Namun demikian, karena banyaknya kritik bahwa *content analysis* hanya bisa mengacu pada data-data obyektif sehingga tidak bisa menggali makna dari teks secara komprehensif, lahirlah *qualitative content analysis* yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam analisis teks (Rahardjo, 2017). Penulisan ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan menggunakan analisis wacana (analisis teks berdasarkan tingkat kalimat), analisis retorik (analisis terhadap teks yang mengandung retorika berupa pidato dan pernyataan), analisis percakapan (analisis berdasarkan pertukaran verbal seperti teks wawancara).

Menurut Zhang dan Wildemuth (2009), *qualitative content analysis* berbeda dengan *content analysis* konvensional dalam aspek jenis penulisan, jenis analisis data, dan metode sampling data. Dari segi jenis penulisan, *quantitative content analysis* dikembangkan di bawah payung penulisan kuantitatif dengan menghitung jumlah kata dari suatu teks untuk mencari makna tertentu. Sebagai kontrasnya, *qualitative content analysis* dikembangkan dari bidang ilmu antropologi, sosiologi, dan psikologi untuk mengeksplorasi makna-makna dari suatu teks secara lebih komprehensif. Dari segi jenis analisis data, *quantitative content analysis* bersifat

deduktif dengan tujuan menguji hipotesis atau rumusan masalah yang diekstraksi dari suatu teori, sedangkan *qualitative content analysis* bersifat induktif yang bertujuan untuk mengembangkan teori atau menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang diamati (Ahmad, 2018). Terakhir dari segi metode sampling data, *quantitative content analysis* menggunakan data-data yang diperoleh secara acak atau pendekatan probabilitas lainnya untuk memastikan validitas penulisan, sedangkan *qualitative content analysis* biasanya terdiri dari teks-teks yang dipilih secara sengaja yang relevan dengan pertanyaan penulisan sedang diselidiki (Zhang & Wildemuth, 2009).

Dalam penulisan ini, penulis akan memberi makna atau tafsir terhadap pilihan diksi atau kata yang digunakan Vladimir Putin dalam pernyataannya yang memiliki pengaruh dalam operasi militer khusus terhadap Ukraina dan sesuai dengan konsep analisis karakter menurut Hermann. Penulis akan menggunakan data-data yang diambil dari wawancara, pidato, komentar, maupun pernyataan Putin dari periode yang berbeda-beda dengan audiens yang juga berbeda untuk menganalisa konsistensi karakter pemimpin.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Dengan teori dan metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini, salah satu poin pertimbangan penting adalah seberapa valid dan kredibel hasil analisis penulisan ini dalam memotret gaya kepemimpinan seseorang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak diterima Hermann dalam proses pengembangan teorinya dan membuat Hermann menyadari bahwa sangatlah penting untuk

menemukan cara untuk bisa mengukur validitas hasil analisa. Alhasil, beliau menemukan bahwa pengukuran validitas bisa dilakukan dengan membandingkan hasil analisa dengan pendapat orang-orang yang paham dengan individu yang menjadi subyek penulisan atau orang-orang yang pernah berinteraksi dengan individu yang menjadi subyek penulisan (Hermann, 1999). Dalam penulisan yang pernah dilakukannya, Hermann membandingkan hasil analisa terhadap dua puluh satu pemimpin dari berbagai negara dengan argumen, pendapat, dan penilaian yang dilakukan berbagai jurnalis maupun pejabat-pejabat pemerintahan yang pernah berinteraksi maupun mendapat kesempatan untuk mengobservasi pemimpin-pemimpin tersebut.

Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memahami peristiwa operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina dan Putin seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina dan akademisi dari Rusia Bapak Laurentius Raymond Jr. P. Sihombing, Ph.D, seorang pakar Hukum Internasional yang sekarang mengajar di Akademi Hukum Rusia. Penulis juga akan membandingkan hasil penulisan dengan argumen pakar-pakar politik internasional mengenai situasi yang terjadi di Ukraina dan apa yang mungkin menjadi motivasi Putin melalui kebijakannya tersebut.